

**EVALUASI PROLEGNAS
RUU PRIORITAS TAHUN 2025
Per 04 September 2025**

**I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH
(PEMBICARAAN TINGKAT I)**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI VII)	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surpres No R-41/Pres/09/2024 tgl 5 Sept 2024 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 9 September 2024 MP I 2024-2025 dibahas oleh Komisi X <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi VII RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi VII
2	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surat Presiden RI Nomor R-37/Pres/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi VII <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi XII RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi XII
3	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surat Presiden No: R-02/Pres/01/2024 tgl 22 Januari 2024 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 20 Agustus 2024 MP I 2024-2025 menugaskan pembahasan di Baleg • RUU sudah selesai proses Pembicaraan TK I di Badan Legislasi tanggal 21 Agustus 2024 • Telah dijadwalkan Rapat Paripurna, namun masih ditunda <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rapur 4 Februari 2025 MP II 2024-2025, menugaskan pembahasan di Badan Legislasi RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi
4	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 26 Agustus 2021 MP I 2021-2022 dibahas oleh Komisi III <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi III RUU dalam proses Pembicaraan Tk I di

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
			Komisi III
5	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tgl 14 Januari 2022 • Tgl 3 Feb 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Komisi III <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi III RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III
6	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/04/2024. Tgl 3 April 2024 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 27 Mei 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh Pansus <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Pansus • Penetapan keanggotaan Pansus dlm Parpur tgl 6 Maret 2025 RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Pansus
7	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/ ANGGOTA	<i>Operan (Carry Over)</i> RUU Kumulatif Terbuka <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surpres Tgl 28 Nov 2022 Nomor : R-61/Pres/11/2022 <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, ditugaskan Komisi III utk menindaklanjuti keputusan Bamus tgl 26 September 2024 Catatan: RUU ini diagendakan dalam Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan pada Rapur di masa Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029 (keputusan Rakonsul Bamus tgl 26 September 2024) Menunggu Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan
8	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimitation of the Exclusive Economic zone Boundary</i>)	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Surat Presiden RI Nomor R-18/Pres/03/2025 Tanggal 4 Maret 2025 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 18 Maret 2025 MP II 2024-2025 dibahas oleh Komisi I RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (judul RUU hasil penyusunan :RUU tentang Hukum Acara Pidana (HAP))	DPR (KOMISI III)	- Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 18 Februari 2025 - Surpres No R-19/Pres/03/2025 tgl 19 Maret 2025 - Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi III RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition</i>)	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka - Surat Presiden RI Nomor R-34/Pres/06/2025 Tanggal 5 Juni 2025 - Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025 dibahas oleh Komisi XIII RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi XIII
11	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka - Surat Presiden RI Nomor R-35/Pres/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025 - Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025 dibahas oleh Komisi Badan Anggaran RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Anggaran

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	- Selesai Penyusunan di Baleg 17 Maret 2025 - Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 20 Maret 2025 - Surpres No R-20/Pres/04/2025 tgl 8 April 2025 Menunggu Penugasan Bamus

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	-	-	-

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	Proses Penyusunan
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (KOMISI II)	Proses Penyusunan
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	Proses Penyusunan
4.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	Proses Penyusunan
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	Proses Penyusunan
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	Proses Penyusunan
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	Proses Penyusunan
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	Proses Penyusunan
9.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	Proses Penyusunan
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	Proses Penyusunan
11.	RUU tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	DPR	Proses Penyusunan

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
		(KOMISI XI)	
12.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	Proses Penyusunan
13.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
15.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
16.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
17.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
18.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
19.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
20.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997	DPR (BADAN	Selesai penyusunan di Baleg Tgl 30 April 2025 Menunggu Rapat Paripurna utk

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	tentang Statistik	LEGISLASI)	disetujui menjadi RUU Usul DPR
22.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
23.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Proses Penyusunan
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	Proses Penyusunan
25.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Proses Penyusunan
26.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Proses Penyusunan
27.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai penyusunan di Baleg Tgl 24 Maret 2025 Menunggu Rapat Paripurna utk disetujui menjadi RUU Usul DPR

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH (5 RUU)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
2.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
3.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
4.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR / KOMISI VI	Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-12 DPR RI MS II, TS 2024-2025 tgl 4 Februari 2025 Telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2.	RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR / BALEG	<i>Kumulatif Terbuka (Akibat Putusan MK)</i> Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-13 DPR RI MS II, TS 2024-2025 tgl 18 Februari 2025 Telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

			Bara.
3.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR / KOMISI I	Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-15 DPR RI MS II, TS 2024-2025 tgl 20 Maret 2025 Telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo Di Provinsi Gorontalo (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo Di Provinsi Gorontalo (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna Di Provinsi Sulawesi	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR

Per 04 September 2025

	Tenggara (Kumulatif Terbuka)		dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 • <i>Surpres No R-33/Pres/05/2025 tgl 19 Mei 2025</i> • Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi II • Disahkan menjadi UU dalam Paripurna tanggal 24 Juli 2025
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-4 DPR RI MS I, TS 2025-2026 tgl 26 Agustus 2025

Jakarta, 4 September 2025
Set. Badan Legislasi DPR RI



Badan Legislasi
DPR RI

EVALUASI PROLEGNAS

PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025

09 SEPTEMBER 2025



RAPAT KERJA
DENGAN MENTERI HUKUM RI & DPD RI



Badan Legislasi
DPR RI

PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025

42 RUU

Saat ini ada 42 RUU yang terdaftar pada daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 sesuai dengan SK. Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)

11 RUU

Saat ini ada 11 RUU pada tahap Pembahasan Tingkat I dengan rincian yakni 5 RUU usul DPR & 6 RUU usul Pemerintah





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



KOMISI VII

**RUU tentang Perubahan ketiga
atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang
Kepariwisataaan**

Operan (Carry Over)

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surpres No R-41/Pres/09/2024 tgl 5
Sept 2024
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tgl 9 September 2024 MP I 2024-2025
dibahas oleh Komisi X

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP
II 2024-2025, dibahas oleh Komisi VII
- RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di
Komisi VII



KOMISI XII

**RUU tentang Energi Baru dan
Energi Terbarukan**

Operan (Carry Over)

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surat Presiden RI Nomor R-
37/Pres/08/2022 tanggal 25
Agustus 2022

- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat
Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-
2023 dibahas oleh Komisi VII

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP
II 2024-2025, dibahas oleh Komisi XII
- RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I
di Komisi XII





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Operan (Carry Over)

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surat Presiden No: R-02/Pres/01/2024 tgl 22 Januari 2024
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 20 Agustus 2024 MP I 2024-2025 menugaskan pembahasan di Baleg
- RUU sudah selesai proses Pembicaraan TK I di Badan Legislasi tanggal 21 Agustus 2024
- Telah dijadwalkan Rapat Paripurna, namun masih ditunda

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Rapur 4 Februari 2025 MP II 2024-2025, menugaskan pembahasan di Badan Legislasi
- RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi



PEMERINTAH

RUU tentang Hukum Acara Perdata

Operan (Carry Over)

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 26 Agustus 2021 MP I 2021-2022 dibahas oleh Komisi III

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi III
- RUU dalam proses Pembicaraan Tk I di Komisi III





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



PEMERINTAH

RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

Operan (Carry Over)

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tgl 14 Januari 2022
- Tgl 3 Feb 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Komisi III
- Periode Keanggotaan 2024-2029
- Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi III

RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III



PEMERINTAH

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara

Operan (Carry Over)

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/04/2024.
Tgl 3 April 2024
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl
27 Mei 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh
Pansus

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-
2025, dibahas oleh Pansus
- Penetapan keanggotaan Pansus dlm Parpur
tgl 6 Maret 2025

RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Pansus





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



DPR / ANGGOTA

RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Operan (Carry Over)
RUU Kumulatif Terbuka

Periode Keanggotaan 2019-2024

- Surpres Tgl 28 Nov 2022 Nomor : R-61/Pres/11/2022

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025,
ditugaskan Komisi III utk menindaklanjuti keputusan
Bamus tgl 26 September 2024

Catatan: RUU ini diagendakan dalam Pembicaraan Tk.
II/Pengambilan Keputusan pada Rapur di masa
Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029 (keputusan
Rakonsul Bamus tgl 26 September 2024)

**Menunggu Rapat Paripurna Pembicaraan Tk.
II/Pengambilan Keputusan**



PEMERINTAH

RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimitation of the Exclusive Economic zone Boundary)

RUU Kumulatif Terbuka

Periode Keanggotaan 2024-2029

- Surat Presiden RI Nomor R-18/Pres/03/2025
Tanggal 4 Maret 2025
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 18
Maret 2025 MP II 2024-2025 dibahas oleh
Komisi I

RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



DPR / KOMISI III

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(judul RUU hasil penyusunan :RUU tentang Hukum Acara Pidana (HAP))

- Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 18 Februari 2025
- Surpres No R-19/Pres/03/2025 tgl 19 Maret 2025
- Rakonsul Bamus tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025, ditugaskan Komisi III

RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III



PEMERINTAH

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition)

RUU Kumulatif Terbuka

- Surat Presiden RI Nomor R-34/Pres/06/2025 Tanggal 5 Juni 2025
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025 dibahas oleh Komisi XIII

RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi XIII





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



PEMERINTAH

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024

RUU Kumulatif Terbuka

- Surat Presiden RI Nomor R-35/Pres/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025
- Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 Juni 2025 MP IV 2024-2025 dibahas oleh Komisi Badan Anggaran

RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Anggaran





Badan Legislasi
DPR RI

RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

1 RUU

Saat ini ada 1 RUU pada tahap akan memasuki
tahap Pembicaraan Tingkat I





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)



DPR / BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Selesai Penyusunan di Baleg 17 Maret 2025
- Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 20 Maret 2025
- Surpres No R-20/Pres/04/2025 tgl 8 April 2025
 - Menunggu Penugasan Bamus





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI

Saat ini belum ada RUU pada tahap Harmonisasi
di Badan Legislasi DPR RI





Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN 27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

1

DPR (KOMISI I)

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2

DPR (KOMISI II)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3

DPR (KOMISI IV)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN 27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

4

DPR (KOMISI IV)

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5

DPR (KOMISI V)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6

DPR (KOMISI VI)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN

27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

7

DPR (KOMISI VI)

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

8

DPR (KOMISI VIII)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

9

DPR (KOMISI IX)

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN

27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

10

DPR (KOMISI X)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

11

DPR (KOMISI XI)

RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

12

DPR (KOMISI XIII)

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN 27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

13

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

14

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

15

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Komoditas Strategis



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN 27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

16

BADAN LEGISLASI
RUU tentang Pertekstilan

17

BADAN LEGISLASI
RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

18

BADAN LEGISLASI
RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN

27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

19

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

20

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

21

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik
(Menunggu Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi RUU usul
DPR RI)



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN

27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

22

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian

23

DPR (ANGGOTA) / DPD

RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

24

DPR (ANGGOTA)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta



Badan Legislasi
DPR RI

RUU PADA PROSES PENYUSUNAN

27 RUU

Saat ini ada 27 RUU
dalam Proses Penyusunan
RUU tersebut berasal dari
usulan DPR

25

DPR (ANGGOTA) / DPD

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

26

DPR (ANGGOTA) / DPD

RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

27

BADAN LEGISLASI

RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Kumulatif Terbuka)
Menunggu Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi RUU usul
DPR RI)



Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH

5 RUU

Saat ini ada 5 RUU dalam tahap
Penyusunan di Pemerintah





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH

1

PEMERINTAH

RUU tentang Desain Industri

2

PEMERINTAH

RUU tentang Hukum Perdata Internasional

3

PEMERINTAH

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik



Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH

4

PEMERINTAH

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

5

PEMERINTAH

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran



Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD RI

1 RUU

Saat ini ada 1 RUU dalam tahap
Penyusunan di DPD RI





Badan Legislasi
DPR RI

RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD RI

1

DPD RI

RUU tentang Daerah Kepulauan



Badan Legislasi
DPR RI

RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

14 RUU

Saat ini ada 14 RUU yang sudah
disetujui menjadi UU





Badan Legislasi
DPR RI

RUU YANG SUDAH DISETUIJUI MENJADI UNDANG UNDANG

1

DPR / KOMISI VI

RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

2

DPR / BALEG

RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3

DPR / KOMISI I

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia



Badan Legislasi
DPR RI

RUU YANG SUDAH DISETUIJUI MENJADI UNDANG UNDANG

4

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo Di
Provinsi Gorontalo (Kumulatif Terbuka)

5

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo Di
Provinsi Gorontalo (Kumulatif Terbuka)

6

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton Di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)



Badan Legislasi
DPR RI

RUU YANG SUDAH DISETUIJUI MENJADI UNDANG UNDANG

7

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe Di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)

8

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka
Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)

9

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna Di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)



Badan Legislasi
DPR RI

RUU YANG SUDAH DISETUIJUI MENJADI UNDANG UNDANG

10

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)

11

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)

12

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)



Badan Legislasi
DPR RI

RUU YANG SUDAH DISETUIJUI MENJADI UNDANG UNDANG

13

DPR / KOMISI II

Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)

14

DPR / KOMISI VIII

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah



Badan Legislasi
DPR RI

TERIMA KASIH

